

02/03-15



DISNAKERSOS

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**

---

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2014**



**BALIKPAPAN  
2015**



DISNAKERSOS

## KATA PENGANTAR

Penerapan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2014 diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan stakeholders sehingga ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2006-2011.

Laporan ini merupakan tolok ukur terhadap capaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.

Balikpapan, Februari 2015

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL  
KOTA BALIKPAPAN



*TIRTA DEWI*  
TIRTA DEWI

NIP. 19671123 198803 2 005



DISNAKERSOS

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	2
D. Isu – isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi	9
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN :	
- Penetapan Kinerja	



DISNAKERSOS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan.

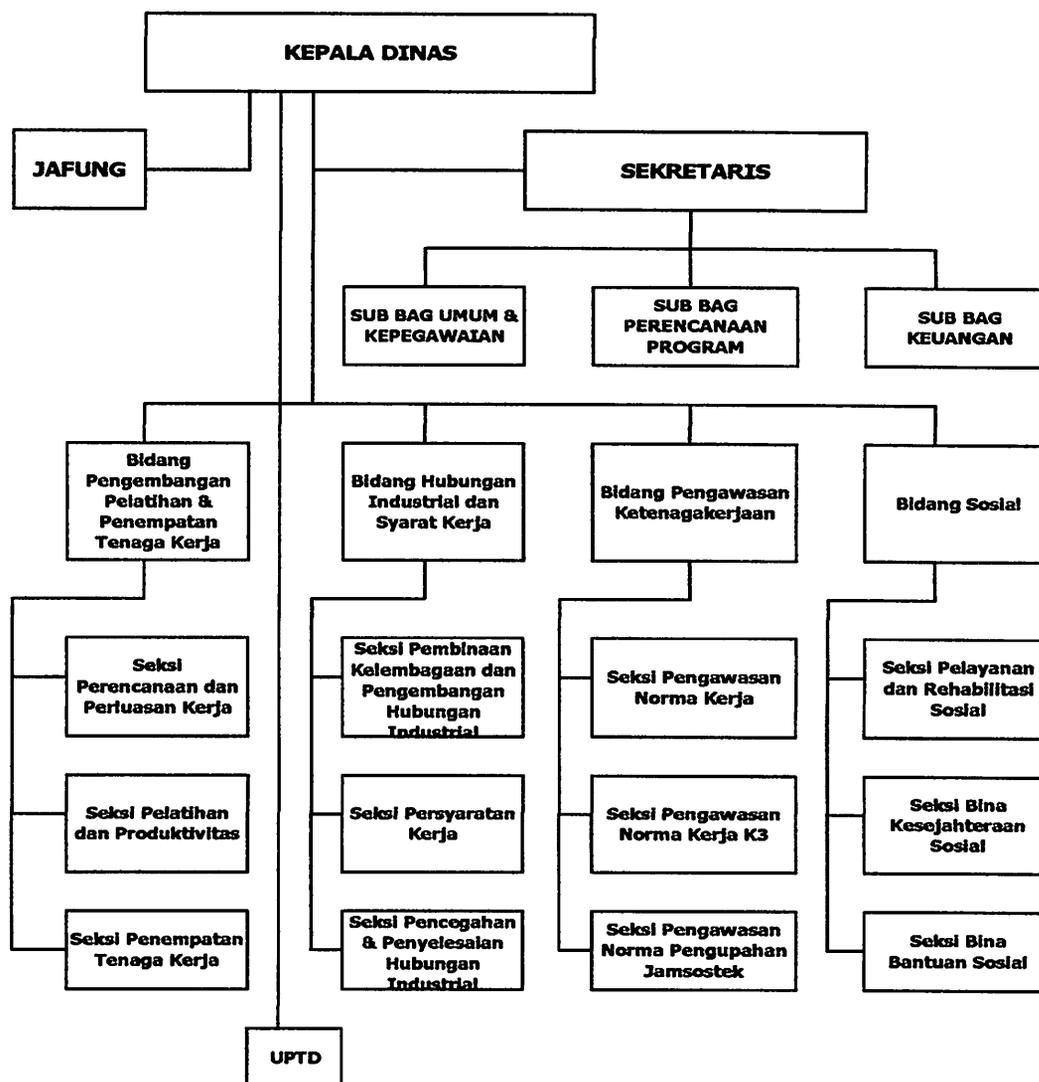
RPJMD Kota Balikpapan periode 2011-2016 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih pada periode tersebut, selanjutnya dijadikan acuan dalam perencanaan pencapaian target kinerja SKPD yang dituangkan dalam Renstra.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja tahun 2014.

Laporan ini disusun berdasarkan format pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2009, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan diatur sebagai berikut :



## C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan sebagai penyelenggara urusan bidang ketenagakerjaan dan bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Aspek-aspek strategis yang terkait dengan urusan ketenagakerjaan antara lain :

BIDANG	ASPEK STRATEGIS
a. Pengembangan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;</li> <li>2. Peningkatan kualitas tenaga kerja;</li> <li>3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja.</li> </ol>
b. Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang selaras dan harmonis.
c. Pengawasan Ketenagakerjaan	- Pembinaan dan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
d. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);</li> <li>2. Peningkatan kemandirian PMKS.</li> </ol>

#### D. ISU-ISU STRATEGI

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi menyangkut :

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
2. Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan;
3. Penurunan perselisihan hubungan industrial;
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



DISNAKERSOS

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pencapaian target kinerja setiap tahunnya telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Renstra Dinas sebagai dokumen perencanaan kinerja SKPD merupakan acuan dalam penyusunan penetapan kinerja.

Target kinerja dan Penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan pada tahun 2014 diuraikan sebagaimana ikhtisar di bawah ini :

Tabel 2.1. Target Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja
I.	Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	65 %
		2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan	60 %
II.	Peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	47 %
III.	Penurunan perselisihan hubungan industrial	Angka kasus perselisihan hubungan industrial	57 %
IV.	Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS	Angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	75 %
V.	Peningkatan Kemandirian PMKS	Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	75 %

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	36
		2. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	98
		3. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	20
		4. Angka beban tanggungan (Dependency Ratio)	-
		5. Angka Pengangguran	-
		6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	-
		7. Penyerapan tenaga kerja	-
		8. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	Non Target
		9. Penggunaan peralatan K3 di perusahaan	1.300
		10. Lembaga K3 di perusahaan	45
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial	Jumlah panti/organisasi sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	33
3.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah masyarakat PMKS;	10.700
		2. Partisipasi sosial lembaga masyarakat;	53
		3. PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	1.650

....selanjutnya

lanjutan....

(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	33
		5. Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30
4.	Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Angka Penyandang Masalah Sosial	10.700
		2. Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau sejenisnya	175
5.	Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	3. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	259
		b. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana)	189

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Pelayanan Administrasiperkantoran	Rp	1.313.942.100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	1.054.222.640
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	28.425.000
4.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp	316.226.000
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1.116.111.250
6.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	947.937.400
7.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	859.112.100
8.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Rp	409.950.000
9.	Program Pembinaan Kelembagaan dan Hubungan Industrial	Rp	336.353.000

	PROGRAM		ANGGARAN
10.	Program Perlindungan Pekerja dan Syarat Kerja	Rp	347.671.800
11.	Program Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	Rp	344.496.600
12.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	565.747.500
13.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp	380.149.000
14.	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Rp	450.000.000
15.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	402.301.300
16.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Rp	789.951.160
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	82.946.300
	Jumlah	Rp	9.745.543.150

Sasaran strategis I yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja. Indikator Kinerja Utama yang dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja terdiri dari :

1. Angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
2. Angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan

Pencapaian sasaran strategis I dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Sasaran strategis II yaitu peningkatan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Keberhasilan kinerja diukur melalui indikator kinerja utama : angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan. Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian kinerja adalah program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Sasaran strategis III yaitu penurunan perselisihan hubungan industrial. Keberhasilan pencapaian kinerja menggunakan indikator

kinerja utama : angka kasus perselisihan hubungan industrial sebagai tolok ukurnya. Pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan program : Pembinaan Kelembagaan dan Hubungan Industrial, Perlindungan Pekerja dan Syarat Kerja, serta Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sasaran strategis IV yaitu peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS. Sasaran tersebut, keberhasilan capaian kinerjanya diukur dengan indikator kinerja utama : angka PMKS yang memperoleh bantuan perlindungan sosial. Program-program yang dilaksanakan SKPD guna mencapai target yang ditetapkan terdiri dari : Penanggulangan Kemiskinan, Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma serta Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Sasaran strategis V yaitu peningkatan kemandirian PMKS. Indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja adalah angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial. Pencapaian kinerja dilaksanakan melalui program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.



DISNAKERSOS

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran  
I

Indikator Kinerja Utama :

1. Angka Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
2. Angka Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Perusahaan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Angka Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja. Pada tahun 2014 penyelenggaraannya terdiri 4 (empat) kejuruan, yaitu : mekanik otomotif, mengemudi, operator crane, dan Uji Tak Rusak Level II .

Berdasar tabulasi pengukuran kinerja, realisasi peserta pelatihan pada tahun 2014 menurun sebesar 25,96 %. Penurunan tersebut bukan merupakan penurunan kinerja, sebab akumulasi angka peserta yang sudah dilatih dari tahun 2012 sampai tahun 2014 sudah mencapai 532 orang. Dalam hal ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sampai tahun 2016 yaitu 434 orang.

Tabel 3.1. Angka Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

	2012	2013	2014
Target	239 orang (55 %)	260 orang (60%)	282 orang (65%)
Realisasi	194 orang (44,60%)	226 orang (52%)	113 orang (26,04 %)
Capaian	81,09%	86,67%	40,06 %



Gambar 3.1. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi

Indikator kedua dari sasaran strategis I adalah angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan. Angka tersebut diperoleh dari kegiatan pemagangan sebagai tindak lanjut dari pelatihan tenaga kerja.

Berikut ini adalah tabulasi hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama : angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan selama 3 tahun terakhir.

Tabel 3.2. Angka Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Perusahaan

	2012	2013	2014
Target	500 orang (50%)	550 orang (55 %)	600 orang (60%)
Realisasi	205 orang (20,54 %)	215 orang (21,52)%	130 orang (13%)
Capaian	41,08 %	39,13%	21,67 %

Berdasarkan hasil pengukuran ( tabel 3.2 ) pencapaian kinerja pada tahun 2014 menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja setiap tahunnya rata-rata menurun sebesar 10 %. Penurunan tersebut antara lain disebabkan jumlah perusahaan yang bersedia

menerima magang masih terbatas. Tindak lanjut yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pemagangan dalam negeri maupun pemagangan luar negeri, selain itu juga diselenggarakan kegiatan *Apprentice Market Fair* (Bursa Pemagangan) yang didesain sebagai wahana untuk mempertemukan pengusaha dengan para calon peserta magang.

Akumulasi penempatan tenaga kerja sampai tahun 2014 sebanyak 550 orang, sedangkan target penempatan tenaga kerja sampai akhir periode Renstra SKPD (2011-2016) adalah 1000 orang, sehingga baru 55 % yang tercapai. Oleh karena ini perlu dilakukan langkah-langkah yang cukup intensif untuk mencapai target tersebut.



Gambar 3.2. Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan

Kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Angka Penempatan Tenaga Kerja yaitu :

1. Pameran Bursa Pemagangan/ Apprentice Market Fair
2. Sosialisasi Pemagangan Ke Luar Negeri

**Sasaran  
II**

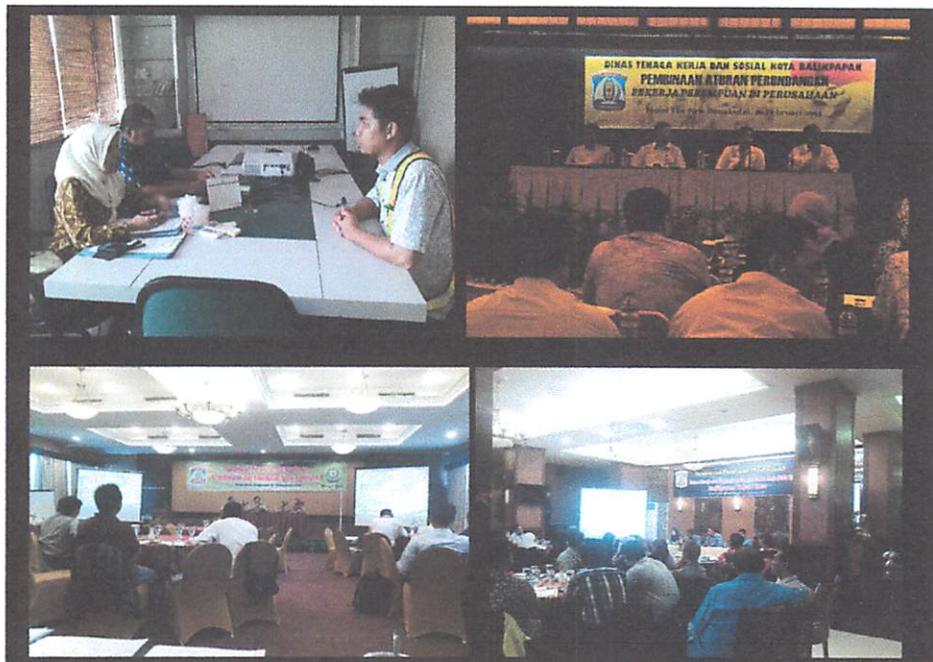
**Indikator Kinerja Utama :  
Angka Kasus Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan Di  
Perusahaan**

Pencapaian kinerja sasaran strategis II diuraikan dalam tabel Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Tabel 3.3. Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan

	2012	2013	2014
Target	74 kasus (49%)	72 kasus (48 %)	71 kasus (47 %)
Realisasi	48 kasus (32 %)	42 kasus (27,84%)	20 kasus (13,33 %)
Capaian	65 %	58 %	28,37 %

Berdasarkan hasil pengukuran dari tahun 2012 sampai 2014 terlihat ada penurunan jumlah kasus setiap tahunnya (tabel 3.3). Pada tahun 2014 jumlah kasus 20 dengan capaian 28,37 %. Trend penurunan jumlah kasus rata-rata adalah 10 kasus per tahun dengan prosentase penurunan rata-rata 18% per tahun.



Gambar 3.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Akumulasi jumlah kasus sampai dengan tahun 2014 sebesar 110 kasus. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD maka prosentase penurunan kasus sampai dengan tahun 2014 sudah terealisasi sebesar 73 %.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target penurunan jumlah kasus-kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan antara lain:

- a. Pemantauan Satgas Tunjangan Hari Raya (THR),
- b. Pengawasan Potensi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pekerja di Luar BPJS Kesehatan,
- c. Kampanye Bulan K3,
- d. Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan,
- e. Pemeriksaan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan,
- f. Penyelesaian Kasus Pengupahan dan Jamsostek,
- g. Pengawasan Norma K3 di Perusahaan.

**Sasaran  
III**

**Indikator Kinerja Utama :  
Angka Kasus Perselisihan Hubungan Industrial**

Sasaran III merupakan tolok ukur kinerja SKPD dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang selaras dan harmonis. Hubungan industrial yang selaras dan harmonis diwujudkan melalui minimalisasi terjadinya perselisihan hubungan industrial, artinya semakin sedikit kasus perselisihan yang terjadi maka kinerja SKPD semakin meningkat. Sedikitnya jumlah kasus merupakan salah satu indikator bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial sudah memahami bagaimana strategi untuk menciptakan pola-pola hubungan yang selaras dan harmonis.

Terjadinya perselisihan hubungan industrial dipengaruhi multi faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perselisihan sebagaimana diungkapkan Patriek Quinn (2003) terdiri dari sejumlah elemen, yaitu :

kerangka hukum, peran, dan sikap mitra sosial serta adat istiadat/ budaya masyarakat

Indikator angka perselisihan hubungan industrial sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD diproyeksikan dalam bentuk prosentase, dan tidak ada informasi kondisi pada tahun 2011, sehingga menyulitkan pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan kondisi tersebut maka pengukuran terhadap pencapaian kinerja SKPD untuk indikator ini dilakukan berdasarkan jumlah perselisihan hubungan industrial yang terdata pada Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, khususnya pada Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pada tahun 2014 jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan sejumlah 61 kasus. Jumlah kasus pada tahun 2012 dan 2013, masing-masing 53 kasus dan 78 kasus, sehingga rata-rata kasus yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial setiap tahunnya sebanyak 64 kasus. Berdasarkan data-data tersebut maka diasumsikan bahwa jumlah kasus perselisihan hubungan industrial sampai dengan tahun 2016 sebanyak 320 kasus.

Penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama (PB) pada tahun 2014 sebanyak 36 kasus. Data tahun 2012 dan 2013, masing-masing sebanyak 30 kasus dan 43 kasus. Kasus yang diselesaikan dengan Anjuran, yaitu : 23 kasus (2012), 28 kasus (2013), dan 21 kasus (2014)

Berikut ini adalah tabulasi pengukuran terhadap indikator penurunan perselisihan hubungan industrial :

Tabel 3.4. Angka Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

	2012	2013	2014
Target	205 kasus (64 %)	192kasus (60 %)	182 kasus (57 %)
Realisasi	53 kasus (17 %)	78 kasus (24,38 %)	61 kasus (19%)
Capaian	26 %	41 %	33 %

Pencapaian kinerja atas indikator penurunan perselisihan hubungan industrial menurun pada tahun ke-2 (2013), dan mengalami kemajuan pada tahun ke-3 (2014). Menurunnya jumlah kasus perselisihan merupakan capaian kinerja yang positif, artinya pelaksanaan pembinaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang terselenggaranya pola-pola hubungan industrial yang selaras dan harmonis memberikan hasil yang cukup signifikan dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif di Kota Balikpapan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Angka Perselisihan Hubungan Industrial terdiri dari :

1. Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit);
2. Penyuluhan Peningatan Pemahaman Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Di Dalam dan Di Luar Hubungan Kerja;
3. Penyuluhan terbentuknya Sarana Hubungan Industrial LKS Bipartit;
4. Pembinaan Syarat Kerja dan Outsourcing;
5. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan Dalam Penetapan UMK;
6. Pembinaan Pengupahan;
7. Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi);
8. Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Kerawanan Ketenagakerjaan;
9. Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
10. Penyuluhan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial.

Sasaran IV adalah peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tolok ukur kinerja yaitu jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial.

Penetapan sasaran ke IV sudah searah dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, tepatnya pada sasaran strategis ke III, yaitu : “meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial menuju kemandirian”.

Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS dalam pengukuran capaian kerjanya mempergunakan angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial sebagai tolok ukurnya, sedangkan di tingkat nasional tolok ukurnya mempergunakan jumlah penerima manfaat yang memiliki kemampuan dasar melakukan aktivitas harian dan jumlah penerima manfaat yang terpenuhinya kebutuhan dasar.

Data PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun 2014 sebanyak 11.062 orang, target kinerja sebanyak 8.297 orang. Target tersebut dicapai melalui Program Pelayanan Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial, serta Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD terdiri atas :

1. Anak Balita Terlantar (ABT);
2. Anak Terlantar (ANTAR);
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
4. Anak Jalanan (Anjal);
5. Anak Yang Memerlukan Perlakuan Khusus (AMPK);
6. Lanjut Usia Terlantar;
7. Penyandang Cacat;
8. Tuna Susila;

9. Gelandangan;
10. Pengemis;
11. Bekas Warga Binaan lembaga Pemasyarakatan(BWLP);
12. Orang dengan HIV/AIDS;
13. Korban Penyalahgunaan Narkoba;
14. Korban Tindak Kekerasan;
15. Pekerja Migran dan Orang Terlantar di Perjalanan;
16. Korban Bencana Alam;
17. Korban Bencana Sosial;
18. Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
19. Fakir Miskin;
20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;
21. Keluarga Berumah Tak Layak Huni.

**Tabel 3.5. Pengukuran Indikator Kinerja Utama : Angka PMKS Yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial**

	2012	2013	2014
Target	65 %	70 %	75 %
Realisasi	12,32 %	12,29 %	11,32 %
Capaian	18,95 %	17,56 %	15,09 %

Berdasarkan tabulasi pengukuran indikator kinerja diatas bahwa target angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial pada tahun 2014 sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 11,32 %. Adapun capaian kinerja sebesar 15,09 %.

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cenderung menurun setiap tahunnya. Penurunan dapat bersifat positif, artinya penurunan tersebut disebabkan PMKS yang seharusnya menerima bantuan mengalami penurunan jumlah karena ada yang meninggal, pindah domisili sehingga tidak dapat dijadikan sasaran pelaksanaan program/kegiatan, dan justeru sudah mandiri setelah mendapatkan manfaat berupa pelatihan ketrampilan maupun bantuan modal usaha.

Sasaran V adalah peningkatan kemandirian PMKS dengan tolok ukur capaian kinerja adalah angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial.

Program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial yaitu : Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Sasaran program pemberdayaan melalui bantuan UEP, yaitu : lanjut usia yang masih potensial dan memiliki usaha, keluarga miskin (usia 18 tahun sampai dengan 56 tahun), dan penyandang cacat yang potensial.

Pencapaian indikator kinerja utama selama 3 tahun terakhir diuraikan dalam tabulasi data berikut ini :

Tabel 3.6. Pengukuran Indikator Kinerja Utama : Angka PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial

	2012	2013	2014
Target	65 %	70 %	75 %
Realisasi	10,40 %	13,84 %	10,41 %
Capaian	16 %	19,77 %	13,88 %

Target indikator kinerja utama pada tahun 2014 sebesar 75 %, dengan realisasi sebesar 10,41 %, dan capaian (prosentase) kinerja sebesar 13,88 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2012 ada penurunan kinerja sebesar 2,12%, dan menurun sebesar 5,12 % dari capaian kinerja pada tahun 2014.

Penurunan tersebut dapat disebabkan jumlah PMKS yang menerima bantuan melalui program pemberdayaan ekonomi produktif harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan

sehingga jumlah penerima bantuan jumlahnya terbatas, pada tahun 2014 belum ada proses penumbuhan kelompok-kelompok baru karena adanya program pemantauan untuk melihat tingkat keberhasilan kelompok-kelompok yang dibentuk pada tahun sebelumnya.

Menyikapi penurunan capaian kinerja indikator angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial, seyogyanya perlu dilakukan evaluasi terhadap kelompok-kelompok yang sudah ada, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan kelompok binaan, serta mengadakan pendataan ulang terhadap sasaran penerima bantuan tersebut.



Gambar 3.5. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Bidang Sosial Dalam Rangka Mencapai Indikator Kinerja Utama : angka PMKS yang menerima bantuan dan perlindungan sosial, maupun angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial.

## B. REALISASI ANGGARAN

Sasaran I	Indikator Kinerja Utama :
	1. Angka Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 2. Angka Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Perusahaan

Realisasi anggaran untuk program-program yang dilaksanakan guna mencapai target yang ditetapkan pada sasaran I ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis I , IKU : Angka Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tahun	Pagu	Realisasi	(%)	Silpa
2012	Rp 1.988.890.000	Rp 1.543.966.700	77,6	Rp 444.923.300
2013	Rp 2.237.044.700	Rp 1.151.928.200	51,5	Rp 1.085.116.500
2014	Rp 1.116.111.250	Rp 806.638.800	72,3	Rp 309.472.450

Berdasarkan tabulasi realisasi anggaran pada tahun 2014 penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis I dengan indikator kinerja utama angka pelatihan berbasis kompetensi sebesar 72,27 %. Penyerapan anggaran pada tahun 2013 sebesar 51,5 %, dan tahun 2012 sebesar 77,6 %. Rata-rata penyerapan anggaran setiap tahunnya 67,1 %.

Penyerapan anggaran pada tahun 2014 sudah cukup baik. Adapun silpa anggaran disebabkan adanya penghematan biaya kontribusi pelatihan, dan sisa negosiasi dari pengadaan langsung/ lelang.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis I , IKU : Angka Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Perusahaan

Tahun	Pagu	Realisasi	(%)	Silpa
2012	Rp 316.285.000	Rp 196.630.450	62,2	Rp 119.654.550
2013	Rp 391.575.400	Rp 203.293.800	51,9	Rp 188.281.600
2014	Rp 947.937.400	Rp 558.290.600	58,9	Rp 389.646.800

Berdasarkan tabulasi realisasi anggaran untuk program yang dilaksanakan guna mencapai “IKU : Angka Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Perusahaan” pada tahun 2014 pagu anggaran lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan penganggaran yang cukup signifikan pada tahun 2014 ini disebabkan ada penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan sampai 3 kali dalam setahun, yaitu kegiatan Job Market Fair. Job Market Fair (JMF) diselenggarakan sampai 3 kali guna mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di Kota Balikpapan serta mengakomodir antusiasme masyarakat pencari kerja yang cukup tinggi.

Pada tahun 2014 capaian penyerapan anggaran sebesar 58,9 %. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2012 sebesar 62,2 %, dan tahun 2013 sebesar 51,9 %. Rata-rata capaian penyerapan anggaran sebesar 57,7 % .

Silpa anggaran pada tahun 2014 merupakan silpa positif. Efisiensi/penghematan anggaran berasal dari kegiatan berikut ini :

- a. Penggunaan gedung milik Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan kegiatan, sehingga biaya sewa gedung yang sudah dianggarkan dapat dihemat.
- b. Penghematan biaya untuk pengadaan bahan bakar solar sebagai cadangan jika terjadi pemadaman listrik PLN pada saat penyelenggaraan kegiatan tidak dipergunakan karena pada waktu penyelenggaraan kegiatan ternyata tidak terjadi pemadaman listrik PLN.

**Sasaran  
II**

**Indikator Kinerja Utama :  
Angka Kasus Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan Di  
Perusahaan**

Realisasi program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebagai salah satu sarana dalam rangka pencapaian target kinerja pada sasaran strategis II, yaitu penurunan angka kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis II, IKU : Angka Kasus Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan Di Perusahaan

Tahun	Pagu	Realisasi	(%)	Silpa
2012	Rp 676.207.100	Rp 613.020.635	90,7	Rp 63.186.465
2013	Rp 635.708.220	Rp 349.584.444	55,0	Rp 286.123.776
2014	Rp 759.666.100	Rp 675.380.600	88,9	Rp 84.285.500

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran pada tabel 3.8 pagu anggaran pada tahun 2014 merupakan pagu tertinggi dan realisasi anggaran tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Capaian tertinggi justru terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 90,7 %, sementara capaian pada tahun 2014 hanya sebesar 88,9 % dan capaian kinerja penyerapan anggaran paling rendah pada tahun 2013. Prosentase penyerapan anggaran setiap tahun sudah lebih dari 50 % sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa capaian kinerja anggaran untuk sasaran strategis II sudah termasuk baik, namun tetap perlu peningkatan pada tahun berikutnya agar capaian kinerja lebih optimal.

Silpa anggaran pada tahun 2014 dikatakan sebagai silpa positif. Hal ini disebabkan adanya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Hasil negosiasi harga dari pengadaan-pengadaan langsung (PL),
- b. Adanya penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan dari tahun sebelumnya sehingga anggaran yang disiapkan untuk penanganan kasus tidak dipergunakan seluruhnya.

**Sasaran  
III**

**Indikator Kinerja Utama :  
Angka Kasus Perselisihan Hubungan Industrial**

Realisasi anggaran dari program-program yang menunjang pencapaian target kinerja dari sasaran strategis III diuraikan dengan tabulasi data berikut ini :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis III, IKU : Angka Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Tahun	Pagu	Realisasi	(%)	Silpa
2012	Rp 570.276.000	Rp 547.084.275	95,9	Rp 23.191.725
2013	Rp 549.016.000	Rp 462.722.556	84,3	Rp 86.293.444
2014	Rp 1.077.521.400	Rp 998.424.400	92,7	Rp 79.097.000

Berdasarkan tabulasi data diatas pada tahun 2014 merupakan pagu anggaran tertinggi untuk mencapai target pada sasaran strategis III, demikian pula dengan jumlah realisasi anggarannya. Realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu hanya sebesar 84,3 %. Prosentase penyerapan anggaran tertinggi pada tahun 2012, dan terendah pada tahun 2013. Pengukuran capaian kinerja anggaran memperlihatkan hasil yang sangat memuaskan karena rata-rata setiap tahunnya melebihi 80 %.

Silpa anggaran merupakan silpa yang bersifat positif karena berasal dari hasil negosiasi harga dalam rangka proses pengadaan langsung (PL).

Sasaran IV	Indikator Kinerja Utama : Angka PMKS Yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial
------------	---

Realisasi anggaran dari program-program yang menunjang pencapaian target kinerja dari sasaran strategis IV diuraikan dengan tabulasi data berikut ini :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis IV, IKU : Angka PMKS Yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial

Tahun	Pagu	Realisasi	(%)	Silpa
2012	Rp 2.040.619.900	Rp 664.046.700	32,5	Rp 1.376.573.200
2013	Rp 1.319.875.500	Rp 685.139.000	51,9	Rp 634.736.000
2014	Rp 945.896.500	Rp 619.830.652	65,5	Rp 326.065.848

Berdasarkan tabulasi data diatas pada Tahun 2012 pagu anggaran sebesar Rp 2.040.619.900 merupakan pagu anggaran tertinggi dibanding dengan pagu pada tahun 2013 dan 2014. Realisasi anggaran tertinggi sebesar Rp 685.139.000 yang tercapai pada tahun 2013, sedangkan realisasi terendah pada tahun 2014. Prosentase penyerapan anggaran tertinggi pada tahun 2014, dan terendah pada tahun 2012.

<b>Sasaran V</b>	<b>Indikator Kinerja Utama : Angka PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial</b>
----------------------	---

Realisasi anggaran dari program-program yang menunjang pencapaian target kinerja dari sasaran strategis V diuraikan dengan tabulasi data berikut ini :

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis V, IKU : Angka PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial

Tahun	Pagu	Realisasi	(%)	Silpa
2012	Rp 846.114.000	Rp 579.764.910	68,5	Rp 266.349.090
2013	Rp 992.947.200	Rp 482.814.050	48,6	Rp 510.133.150
2014	Rp 1.725.198.760	Rp 1.344.743.399	77,9	Rp 380.455.361

Berdasarkan tabulasi data diatas pada Tahun 2014 pagu anggaran sebesar Rp 1.725.198.760 merupakan pagu anggaran tertinggi dibanding dengan pagu pada tahun 2012 dan 2013. Realisasi anggaran tertinggi sebesar Rp 1.344.743.399 yang tercapai pada tahun 2014, sedangkan realisasi terendah pada tahun 2013. Prosentase penyerapan anggaran tertinggi pada tahun 2014, dan terendah pada tahun 2013. Secara umum jika dilihat dari rata-rata tahunan capaian kinerja anggaran dapat dikatakan pelaksanaan program dalam rangka mencapai target pada sasaran strategis V masuk dalam kategori cukup, yaitu sebesar 60,9 %.



DISNAKERSOS

## BAB IV PENUTUP

Secara umum target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan tahun 2014 disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis I dengan indikator kinerja utama angka tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi telah mencapai target yang ditetapkan.
2. Sasaran strategis I dengan indikator kinerja utama angka tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan belum mencapai target yang ditetapkan sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target.
3. Sasaran strategis II dengan indikator kinerja utama penurunan kasus pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di perusahaan sudah mencapai 75 % dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra (2011-2016), tindak lanjut dalam rangka pemenuhan target harus dilakukan dengan intensif agar capaian kinerja dapat optimal.
4. Sasaran strategis III dengan indikator kinerja utama angka perselisihan hubungan industrial mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah kasus perselisihan merupakan capaian kinerja yang positif, artinya pelaksanaan pembinaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan, serta kegiatan-kegiatan lainnya sangat menunjang terselenggaranya pola-pola hubungan industrial yang selaras dan harmonis.
5. Sasaran strategis IV dengan indikator kinerja utama angka PMKS Yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial menurun sebesar 2,47 % dari tahun sebelumnya. Terkait dengan capaian kinerja perlu dilakukan pendataan ulang terhadap jumlah PMKS Kota Balikpapan

minimal 2 tahun sekali untuk mengetahui perkembangan jumlah PMKS.

6. Sasaran strategis V dengan indikator kinerja utama angka PMKS Yang Menerima bantuan pemberdayaan cenderung menurun dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan capaian kinerja.



DISNAKERSOS

## LAMPIRAN



## **PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TIRTA DEWI**  
Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL  
KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**  
Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

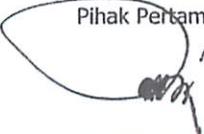
1. Akan mewujudkan target kinerja tahun 2014 sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Untuk lebih antisipasi, meningkatkan partisipasi dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana angka 1 per 6 bulan kepada Walikota.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 27 Januari 2014

Pihak Kedua,  
  
H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,  
  
TIRTA DEWI

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan  
Tahun/Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	
1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	36	AMP (Apprentice Market Fair)	Rp 117.250.000	
			Pemagangan Ke Luar Negeri	Rp 49.775.000	
	2. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	98	Pelatihan Tenaga Kerja di Balikpapan	Rp 949.086.250	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Rp 30.665.000	
			Pelatihan Tenaga Kerja Gakin	Rp 409.950.000	
			Job Market Fair (JMF)	Rp 442.152.400	
			Sosialisasi Perpanjangan IMTA	Rp 33.415.000	
	3. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	20	Pelayanan Antar Kerja	Rp 118.471.000	
			Penyuluhan dan Pelayanan Bimbingan Jabatan	Rp 29.975.000	
	4. Angka beban tanggungan (Dependency Ratio) 5. Angka Pengangguran 6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja 7. Penyerapan tenaga kerja 8. Angka Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja 9. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	67.955	Pembangunan Aplikasi Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 49.000.000	
			Pemberdayaan Tenaga Kerja Sarjana dan Tenaga Kerja Skill	Rp 65.085.000	
		10. Penggunaan peralatan K3 di perusahaan	1.300	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 81.830.000
				Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Rp 186.950.000
11. Lembaga K3 di perusahaan		45	Rakor Perencanaan Tenaga Kerja dan Kebutuhan Lapangan Kerja	Rp 127.840.000	
			Pemantauan Satgas Tunjangan Hari Raya (THR)	Rp 24.620.000	
12. Jumlah perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan		40	Pengawasan Potensi Kepesertaan Program Jaminan	Rp 49.841.400	
			Kesehatan Pekerja di Luar Jamsostek	Rp 79.958.100	
13. Program jaminan sosial lainnya.		30.636	Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan	Rp 108.106.000	
			Kampanye Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Rp 47.725.000	
	Pemeriksaan Norma Kerja		Rp 100.721.400		
			Pembinaan Norma K3	Rp 28.151.200	
			Pembinaan Pejabat Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 155.638.000	
			Pemeriksaan Penerapan Aturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Rp 115.905.000	
			Penyelesaian Kasus Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Rp 49.000.000	
			Pembangunan Sistem/Aplikasi Data Base Perusahaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan/K3	Rp 214.155.000	
			Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit)	Rp 38.785.000	
			Penyuluhan Peningkatan Pemahaman Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja di dalam dan diluar Hubungan Industrial	Rp 83.413.000	
			Pemasyarakatan Hubungan Industrial		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
			Pembinaan Syarat Kerja dan Outsourching Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan Kota Bpp Pembinaan Pengupahan Pembangunan Aplikasi/Sistem Informasi HI dan syaker Penyelesaian Perkara Perselisihan Pencegahan Hubungan Industrial (Mediasi) Penanggulangan dan Koordinasi Kerawanan Ketenagakerjaan Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan HI Penyuluhan Pencegahan Perselisihan HI	Rp 51.794.000 Rp 256.499.800 Rp 39.378.000 Rp 49.000.000 Rp 35.865.000 Rp 182.900.000 Rp 82.481.600 Rp 43.250.000
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial	1. Jumlah panti/organsiasi sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah dan non pemerintah	33	Rehabilitasi Sosial Penderita Gangguan Jiwa (Orgil) Rehabilitasi Anak Jalanan (Anjal), Gepeng dan OT Pembinaan Wanita Tuna Susila (WTS) Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Rp 137.191.000 Rp 201.041.500 Rp 227.515.000 Rp 380.149.000
3. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan	1. Jumlah masyarakat PMKS 2. Partisipasi sosial lembaga masyarakat 3. PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar 4. Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 5. Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	10.700 53 1.650 33 30	Pemeliharaan Jejaring dan Up Date Data PMKS, PSKS Pendamping Dana Dekonsentrasi Askessos bagi Pekerja Sektor Non Formal Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Panti Asuhan Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pembinaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Hari Pahlawan Kajian Kota Layak Lansia Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Rp 58.124.000 Rp 54.766.800 Rp 300.000.000 Rp 150.848.360 Rp 77.107.400 Rp 82.946.300 Rp 150.000.000 Rp 162.243.200
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Angka Penyandang Masalah Sosial 2. Angka PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau sejenisnya	10.700 175	Penyuluhan Sosial tentang PMKS Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Rp 53.151.000 Rp 193.094.000
5. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2. Jumlah Taruna Slaga Bencana (Tagana)	259 189	Pelatihan Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pembinaan Taruna Slaga Bencana (Tagana)	Rp 108.183.900 Rp 392.857.800

Jumlah Anggaran : Rp. 9.745.543.150,-  
 - Program/Kegiatan : Rp. 7.257.851.410,-

